



**Judul harus Menggambarkan Isi Makalah secara Akurat  
(Capitalize Each Word, Bold, Font Georgia 14, Spasi 1,  
Maksimal 14 Kata)**

***The Title must Accurately Describe the Contents of the  
Paper (Capitalize Each Word, Bold, Georgia Font 14,  
Spacing 1, Maximum 14 Words)***

Nama Penulis :  
Instansi :  
Email Korespondensi :  
Penulis :

Riwayat Artikel	Diterima (tanggal bulan tahun)	Direvisi (tanggal bulan tahun)	Disetujui (tanggal bulan tahun)
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**Berita Artikel**

**Kata Kunci:** Abstrak (maksimal 250 kata)

Kata Pertama;  
Kata Kedua;  
Kata Ketiga;  
Kata Keempat;  
Kata Kelima  
(Georgia 10;  
alphabet; min. 3  
dan max. 5 kata  
kunci; titik koma  
[:])

Komponen yang harus ada dalam lembar abstrak ini adalah: *Pertama*, **Latar Belakang Masalah** menyajikan gambaran umum mengenai isu atau fenomena yang menjadi fokus kajian, menjelaskan adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi, mengidentifikasi permasalahan spesifik yang akan dikaji, dan menunjukkan signifikansi atau urgensinya untuk dilakukan kajian. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa topik kajian relevan, menarik, dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah praktis. *Kedua*, **Metodologi** menjelaskan pendekatan kajian yang digunakan (misalnya, kuantitatif, kualitatif, atau campuran), desain kajian (misalnya, eksperimen, survei, studi kasus, etnografi), populasi dan sampel objek kajian (termasuk teknik pengambilan sampel dan ukuran sampel), instrumen pengumpulan data yang digunakan (misalnya, kuesioner, wawancara, observasi, tes), serta teknik analisis data yang diterapkan untuk mengolah dan menginterpretasikan informasi yang terkumpul. Bagian ini harus memberikan detail yang cukup bagi pembaca untuk memahami dan mengevaluasi validitas serta reliabilitas kajian yang dilakukan. *Ketiga*, **Hasil dan Pembahasan** menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis data secara jelas dan ringkas. *Keempat*, **Kesimpulan dan Rekomendasi**. Kesimpulan menyajikan intisari temuan utama dan implikasi signifikannya tanpa mengulang detail hasil. Sementara rekomendasi menawarkan sebuah kebijakan atau saran spesifik yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait (misalnya, peneliti selanjutnya, praktisi, pembuat kebijakan) berdasarkan interpretasi hasil kajian.

**Catatan:** Ketentuan penulisan abstrak: isi berkisar 200-250 kata; ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu: bahasa Indonesia dan Inggris (tulisan miring) dan/atau sebaliknya; dalam 1 (satu) paragraf – rata kiri dan kanan, 1 spasi, 1 kolom, dan menggunakan font jenis *Georgia*, ukuran 10pt.

**Keyword:** **Abstract** (maximum 250 words)

---

First keyword;  
Second keyword;  
Third keyword;  
Fourth keyword;  
Fifth keyword;  
(Georgia 10;  
alphabetic; min.  
3 and max. 5  
keywords;  
Semicolon [;])

---

The components that must be included in this abstract sheet are: First, the **Background of the Problem** presents a general overview of the issue or phenomenon that is the focus of the study, explains the existence of a gap between the ideal condition and the reality, identifies the specific problems to be studied, and demonstrates the significance or urgency of conducting the study. This paragraph aims to convince the reader that the study topic is relevant, interesting, and contributes to the development of scientific knowledge or the solution of practical problems. Second, the **Methodology** explains the research approach used (e.g., quantitative, qualitative, or mixed methods), the research design (e.g., experiment, survey, case study, ethnography), the population and sample of the study objects (including sampling techniques and sample size), the data collection instruments used (e.g., questionnaires, interviews, observations, tests), as well as the data analysis techniques applied to process and interpret the collected information. This section should provide sufficient detail for the reader to understand and evaluate the validity and reliability of the study conducted. Third, the **Results and Discussion** presents the main findings obtained from the data analysis clearly and concisely. Fourth, **Conclusion and Recommendation**. The conclusion presents the essence of the main findings and their significant implications without repeating the details of the results. Meanwhile, the recommendation offers a specific policy or suggestion aimed at relevant parties (e.g., future researchers, practitioners, policymakers) based on the interpretation of the study results.

Note: Abstract writing guidelines: the content ranges from 200-250 words; written in 2 (two) languages, namely: Indonesian and English (italics) and/or vice versa; in 1 (one) paragraph – justified alignment, single spacing, 1 column, and using Georgia font, size 10pt.

---

---

**To cite this article:** Author. (year). *Titel of Article*. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume (issue), Page. DOI

---

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

---

## PENDAHULUAN

(Subjudul: **Bold**; Georgia 12pt; after 6pt)

### **Latar Belakang Masalah** (Sub-Subjudul: **Bold**; Georgia 11pt; after 6pt)

Latar belakang masalah artikel kebijakan menguraikan konteks sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang melatarbelakangi munculnya suatu isu kebijakan yang memerlukan perhatian dan tindakan. Latar belakang masalah kebijakan ini menyajikan gambaran umum mengenai isu kebijakan yang relevan, menjelaskan bagaimana isu tersebut muncul dan berkembang, menyoroti dampak atau konsekuensi negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat atau sistem yang ada, menunjukkan adanya kebutuhan atau urgensi untuk intervensi kebijakan, serta merujuk pada kebijakan atau upaya yang telah ada sebelumnya (jika ada) dan mengapa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif atau memerlukan penyempurnaan. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pembuat kebijakan tentang signifikansi isu kebijakan yang diangkat dan perlunya analisis atau formulasi kebijakan yang lebih baik.

Latar belakang masalah ini harus didukung oleh sumber rujukan atau referensi, baik berupa jurnal, buku, hasil penelitian, prosiding, maupun artikel lainnya yang berasal dari *manual book/printing* atau digital, seperti: website atau internet. Adapun cara pencantuman sumber rujukan tersebut dengan sistem *innote/bodynote* menggunakan

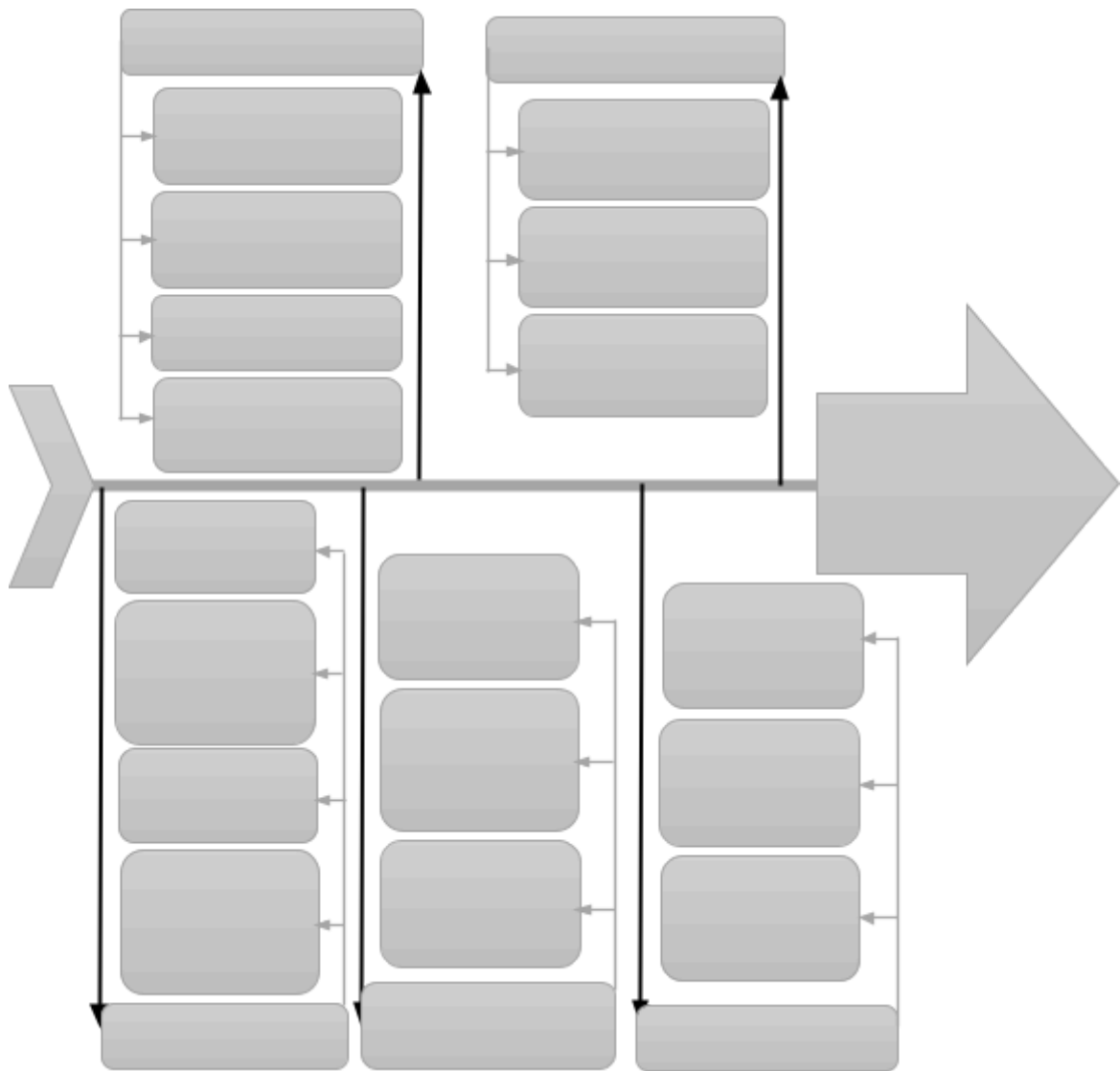
*Reference Manager* aplikasi **ZOTERO** atau **MENDELEY** dengan gaya kutipan *American Psychological Association (APA) Ed 7<sup>th</sup>*. Contoh menggunakan *innote* dengan ZOTERO menggunakan referensi *buku* (Alshodiq 2020) atau (Sunaryo 2025). Contoh lainnya menggunakan *jurnal* (Hamdi 2023), *internet* (JambiLINK.id 2024), *hasil penelitian* (Heny dan Pamungkas 2016), *peraturan perundang-undangan* (Undang-Undang Republik Indonesia 2003), *kamus* (A.W. Munawwir 1997), dan sebagainya.

Artikel yang dikirimkan harus original dari penulis dengan ketentuan; maksimal 15% plagiat yang diizinkan jurnal ini serta belum pernah dipublikasikan di mana pun. Artikel yang sudah diterima dan sudah melalui proses editing dan *review* akan dipublikasi secara bertahap melalui *Open Journal System (OJS)* sesuai ketentuan jurnal ini. Tulisan menggunakan format satu kolom dengan huruf Georgia 11pt, spasi 1, *Justify, After 6pt*, kertas A4 (210 x 297 mm), *margin* kiri dan kanan = 2,5 cm serta atas dan bawah masing-masing 3 cm.

### **Identifikasi Masalah** (Sub-Subjudul: Bold; Georgia 11pt; after 6pt)

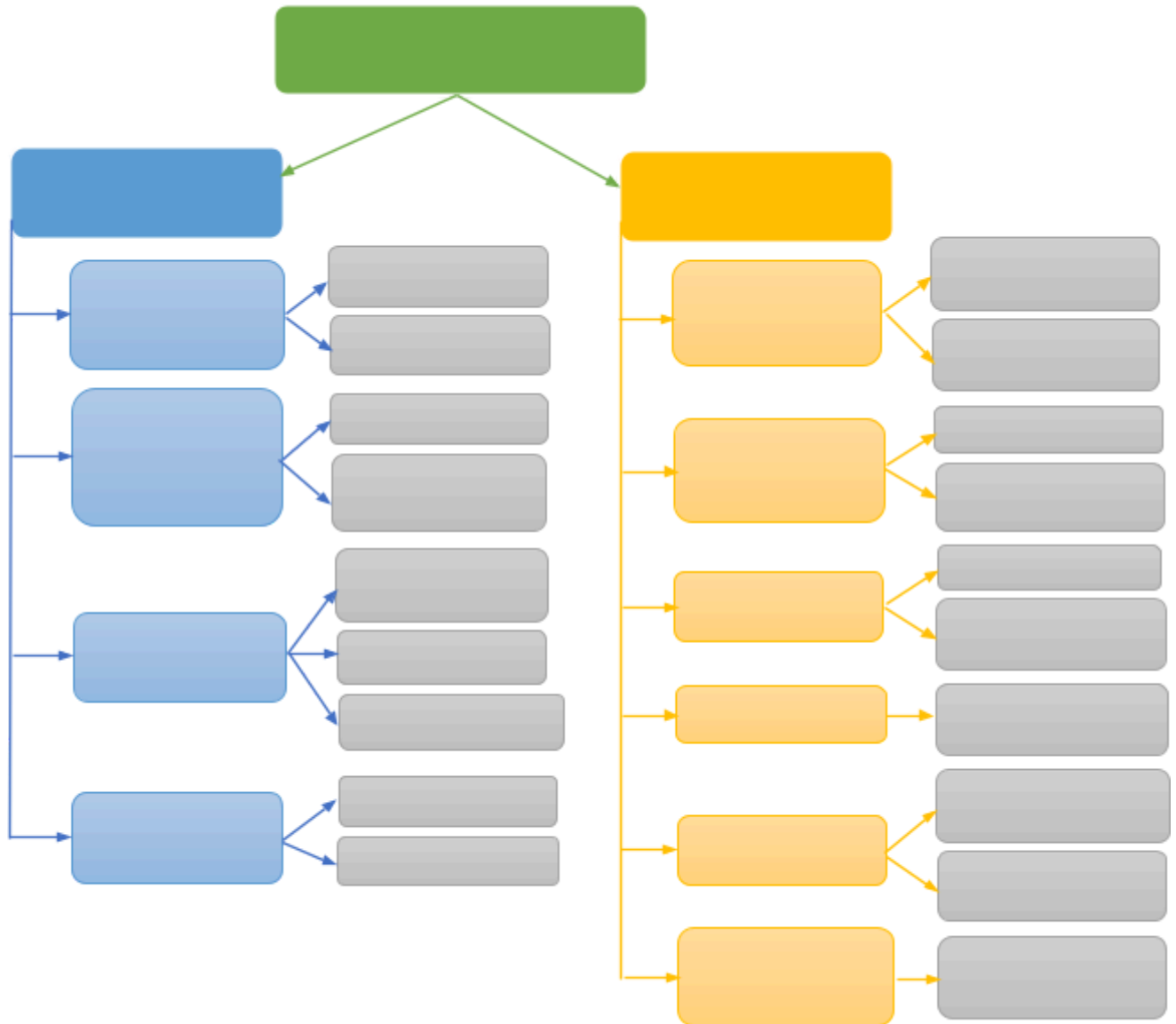
Identifikasi masalah adalah tahap awal yang krusial dalam proses kajian ilmiah, di mana penulis secara spesifik menentukan dan merumuskan isu atau pertanyaan sentral yang ingin dipecahkan atau dijawab melalui kajian ilmiah. Oleh karena itu, identifikasi masalah menguraikan secara ringkas fenomena atau gejala yang diamati, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan atau relevan untuk dikaji, dan merumuskan secara jelas batasan serta fokus dari masalah yang akan dieksplorasi dalam kajian tersebut. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah kepada pembaca mengenai isu utama yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan kajian. Karena itu, dalam uraian setiap identifikasi masalah harus didukung oleh data, baik berupa hasil penelitian atau kajian ilmiah lainnya. Data-data harus ditunjukkan dalam bentuk rujukan *innote/bodynote*.

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “pohon masalah”, baik dalam bentuk *flowchart* atau menggunakan teori, seperti *fishbone*. Berikut contoh *flowchart* dan diagram *fishbone*:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

Atau menggunakan *flowchart*, sebagaimana contoh terlampir



**Gambar 1.** Pohon Masalah

Kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Teori USG ini membantu seseorang atau organisasi dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan seberapa mendesak (*urgency*) suatu ide atau proyek untuk ditangani, seberapa serius (*seriousness*) dampak negatif yang mungkin timbul jika tidak ditangani, dan seberapa besar potensi pertumbuhan atau manfaat (*growth*) yang dapat dihasilkan jika ide atau proyek tersebut berhasil diimplementasikan. Dengan mengevaluasi setiap ide atau proyek berdasarkan ketiga dimensi ini, seseorang/organisasi dapat memprioritaskan inisiatif yang paling kritis dan memiliki potensi dampak terbesar bagi pencapaian tujuan organisasi.

Contoh tabel USG:

Daftar Masalah	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	Total Nilai
Masalah 1				
Masalah 2				
Masalah 3				

Masalah 4				
Masalah 5				

Hasil tabel hasil skoring di atas “hanya” untuk mengetahui “nilai” masalah yang memiliki tingkat USG yang paling tinggi untuk dijadikan *problem statement*, tidak perlu dimunculkan sebagai bagian dari isi artikel (*tabel cukup dicantumkan sebagai lampiran di akhir halaman artikel*).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil USG di atas, kemudian dijadikan sebagai bahan dalam “rumusan masalah”. Dalam artikel kebijakan, rumusan masalah dibuat dalam bentuk “*problem statement*” atau pernyataan masalah, bukan “*research question*” atau pertanyaan penelitian. Pernyataan masalah “*problem statement*” adalah uraian ringkas dan jelas mengenai isu atau kesenjangan spesifik yang menjadi fokus utama kajian kebijakan, yang mengartikulasikan secara langsung dan padat kondisi atau situasi problematik yang ada, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, atau mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk pemahaman atau solusi yang lebih mendalam. Pernyataan ini berfungsi untuk menetapkan konteks kajian kebijakan dan meyakinkan pembaca tentang pentingnya kajian tersebut, dengan menyoroti mengapa isu yang diangkat perlu untuk dikaji lebih lanjut.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan suatu isu kebijakan tertentu.
2. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
3. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru atau perbaikan terhadap kebijakan yang sudah ada, lengkap dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan (pemerintah, parlemen, organisasi) serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan.
5. Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan yang penting, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap implikasi suatu kebijakan.
6. Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh data, penelitian, dan argumentasi yang logis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terpercaya mengenai suatu isu kebijakan.
2. Menyajikan berbagai alternatif kebijakan dan analisis dampaknya, artikel ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih informed dan efektif.

3. Mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diubah agar kebijakan menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
4. Melalui analisis dan kritik terhadap kebijakan yang ada, artikel ini dapat mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.
5. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, artikel kebijakan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif dalam perdebatan dan pembentukan kebijakan.
6. Analisis yang cermat dalam artikel kebijakan dapat mengidentifikasi potensi risiko atau dampak negatif dari suatu kebijakan, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dipertimbangkan sejak awal.
7. Dengan menawarkan perspektif baru dan alternatif yang kreatif, artikel kebijakan dapat memicu inovasi dalam perumusan solusi terhadap masalah-masalah kebijakan.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual dalam artikel kebijakan publik merupakan landasan analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi isu kebijakan yang diangkat.

**Kerangka teori** menyajikan teori-teori yang relevan dari ilmu sosial atau studi kebijakan yang dapat memberikan perspektif dalam menganalisis masalah kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan konsekuensinya, serta merumuskan alternatif solusi.

**Kerangka konseptual** mendefinisikan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis, membangun hubungan logis antarkonsep tersebut, dan menyajikan model atau peta pemikiran yang memandu penulis dalam menginterpretasikan data atau informasi yang relevan dengan isu kebijakan yang dibahas. Dengan adanya kerangka ini, analisis kebijakan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.

## METODOLOGI

Metodologi dalam artikel kebijakan merujuk pada pendekatan sistematis dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan isu kebijakan yang dibahas. Bagian ini menjelaskan bagaimana penulis mengumpulkan data atau bukti (misalnya, melalui analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan, studi kasus kebijakan serupa, atau analisis data statistik), serta metode analisis yang diterapkan untuk mengolah informasi tersebut guna menjawab pertanyaan kebijakan atau mengevaluasi alternatif tindakan.

Beberapa pendekatan metodologis yang dapat digunakan dalam menganalisis sebuah artikel kebijakan, seperti: analisis kualitatif (misalnya: studi kasus mendalam, wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan), analisis kuantitatif (misalnya: analisis statistik data sekunder, pemodelan ekonometri, survei), analisis campuran metode (kombinasi kualitatif dan kuantitatif), evaluasi kebijakan (misalnya: evaluasi dampak, evaluasi proses), analisis biaya-manfaat, analisis risiko, serta metode partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses

analisis. Pilihan metodologi akan bergantung pada pernyataan kebijakan yang ingin dijawab, ketersediaan data, dan kerangka teoretis yang digunakan.

Metodologi yang jelas dan transparan memungkinkan pembaca untuk memahami dasar argumentasi penulis dan menilai validitas serta reliabilitas dari analisis kebijakan yang disajikan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Bagian "Hasil" dalam artikel kebijakan menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari penerapan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Temuan ini harus disajikan secara jelas, ringkas, dan terstruktur, yang didukung oleh data, tabel, grafik, atau kutipan yang relevan dari dokumen atau wawancara. Dengan ketentuan:

1. Menampilkan data yang diperoleh, baik dalam bentuk essay atau deskripsi naratif.
2. Data dalam bentuk essay harus dilengkapi dengan sumber aslinya, seperti: hasil wawancara (identitas narasumber dan tanggal wawancara). Hasil wawancara langsung ditulis dengan posisi tulisan: *left indent*, font Georgia 10pt, justify, spasi 1.

#### Contoh:

Wawancara dilakukan dengan Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2025. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan, PTSP masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan jumlah petugas dan penggunaan teknologi informasi. Informan mengungkapkan:

"Saat ini kami masih kekurangan tenaga pelayanan, sehingga terkadang antrian menjadi panjang, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, sistem online yang kami gunakan belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga ada beberapa layanan yang tetap membutuhkan proses manual." (Mukhtar Alshodiq)

Selain itu, menurut informan, upaya peningkatan kualitas layanan telah dilakukan melalui pelatihan rutin dan penyusunan standar pelayanan minimal. Namun, keberhasilan program ini masih bergantung pada peningkatan sarana prasarana dan dukungan manajemen. Informan menambahkan:

"Kami berusaha memperbaiki pelayanan dengan pelatihan rutin kepada staf, namun fasilitas yang terbatas kadang menghambat efektivitasnya." (Mukhtar Alshodiq)

3. Data dalam bentuk tabel: Judul **Tulisan Tabel dan Nomor** (*bold*) kemudian diberi titik (.). Kemudian nama judul tabel (reguler), font Georgia 10pt, *before 6pt* dan *after 6pt*, spasi 1, *left*, *Capitalize Each Word*. Posisi judul tabel terletak di atas data tabel, garis tabel bentuk horizontal, dan sumber tabel terletak di bawah data tabel, *italic*, dan font Georgia 9pt, *after 6pt*, *Capitalize Each Word*.

#### Contoh:

**Tabel 1.** The Sample of Table Format (Left, Georgia, 10)

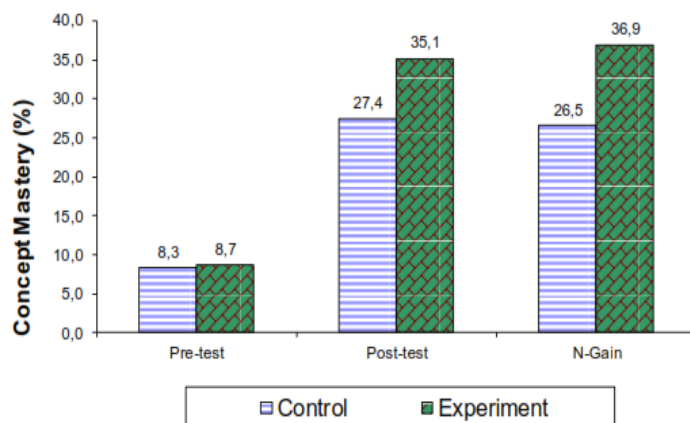
No	Description	Explanation
1	Description 1	Explanation
2	Description 2	Explanation
3	Description 3	Explanation
4	Description 4	Explanation
5	Description 5	Explanation

*Sumber: Data Diolah.*

4. Data dalam bentuk grafik dan diagram: Judul **Tulisan Grafik/Diagram dan Nomor** (*bold*) kemudian diberi titik (.). Kemudian nama judul grafik/diagram

(reguler), font Georgia 10pt, *before opt* dan *after 6pt*, spasi 1, *Capitalize Each Word*. Posisi judul grafik/diagram terletak di bawah gambar grafik/diagram dan sumber grafik/diagram terletak di bawah judul grafik/diagram, *italic, Capitalize Each Word*, dan font Georgia 9pt.

**Contoh:**



**Gambar 1.** Contoh Gambar Koefisien Serapan Spektrum dari Material Semikonduktor Organik  
*Sumber: Data Diolah.*

5. Singkatan dan akronim

**Singkatan** dapat digunakan setelah disebutkan atau ditulis secara lengkap dalam paragraf sebelumnya dan singkatan kata ditempatkan dalam tanda kurung. Misalnya: "PP" ini harus dituliskan lengkap sebelum disingkat, karena menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda, bisa dibaca: Peraturan Pemerintah atau *Policy Paper*, PMA (bisa dibaca: Peraturan Menteri Agama atau Putusan Mahkamah Agung), dan sebagainya. Sedangkan **akronim** adalah singkatan yang sudah sering atau populer diucapkan, sehingga tidak perlu ditulis lengkap pada paragraf sebelumnya, seperti: ponsel (telepon seluler), sembako (sembilan bahan pokok), sms (*short message service*), Kanwil (Kantor Wilayah), Kemenag (Kementerian Agama), Renstra (rencana strategis), dsb (dan sebagainya).

6. Data harus disajikan secara **jelas, ringkas, dan fokus pada tujuan penelitian.**

Fokus utama pada bagian ini adalah untuk menyampaikan informasi faktual yang relevan dengan pernyataan atau isu kebijakan yang diangkat, tanpa memberikan interpretasi atau analisis mendalam. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami secara langsung apa yang ditemukan melalui proses pengumpulan dan analisis informasi.

Selanjutnya, bagian "Pembahasan" merupakan inti tulisan yang dihasilkan dari temuan (hasil). Di sinilah penulis menginterpretasikan temuan-temuan yang telah disajikan dalam bagian hasil dan mengaitkan dengan kerangka teori dan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, membandingkannya dengan kebijakan atau studi kasus serupa (jika relevan), dan menjelaskan implikasi temuan tersebut terhadap isu kebijakan yang sedang dianalisis.

Lebih lanjut, dalam pembahasan, penulis harus secara kritis menganalisis temuan-temuan tersebut dalam konteks politik, sosial, ekonomi, atau lingkungan yang lebih luas. Hal ini melibatkan identifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat, kepentingan mereka, serta potensi tantangan atau peluang dalam implementasi kebijakan. Diskusi mendalam mengenai asumsi-asumsi yang mendasari analisis dan potensi keterbatasan metodologi yang digunakan juga penting untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas artikel.

Akhirnya, bagian pembahasan harus mengarah pada sintesis dan argumentasi yang kuat terkait implikasi kebijakan atau alternatif kebijakan yang akan diajukan pada bagian selanjutnya. Penulis harus mampu merangkai temuan-temuan yang telah dilakukan untuk mendukung klaim atau argumen utama mengenai arah kebijakan yang sebaiknya diambil. Pembahasan yang komprehensif dan mendalam akan memperkuat kontribusi artikel kebijakan dalam memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

### **Analisis Kebijakan**

Berdasar hasil dan pembahasan di atas, penulis kemudian menganalisis dengan mengaitkan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dan diterapkan selama ini secara sistematis dan kritis dalam berbagai aspek terkait suatu kebijakan, baik yang sudah ada maupun yang diusulkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi informasi yang relevan untuk memahami masalah kebijakan, mengidentifikasi tujuan kebijakan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang ada, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan berbasis bukti (dalam bentuk peraturan perundang-undangan) kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi.

Lebih lanjut, analisis kebijakan melibatkan penerapan berbagai kerangka teori, metode, dan teknik untuk membongkar kompleksitas suatu isu kebijakan. Ini mencakup identifikasi aktor-aktor yang terlibat dan kepentingan mereka, pemetaan proses kebijakan, penilaian terhadap konteks politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kebijakan, serta evaluasi terhadap nilai-nilai dan asumsi yang mendasari kebijakan tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang realistis, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan potensi konsekuensi jangka panjang.

### **Limitasi Kajian**

Limitasi kajian mengidentifikasi faktor-faktor, seperti keterbatasan data yang tersedia, asumsi-asumsi yang mendasari analisis, ruang lingkup isu kebijakan yang dibatasi, potensi bias dalam pengumpulan atau interpretasi informasi, serta kendala metodologis yang mungkin mempengaruhi validitas atau generalisasi temuan. Pengungkapan limitasi penting untuk memberikan gambaran yang lebih jujur dan transparan mengenai kekuatan dan kelemahan analisis kebijakan, serta untuk memberikan konteks yang tepat dalam menginterpretasikan kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan atau kontribusi dalam artikel kebijakan merujuk pada aspek unik dan orisinal dari analisis yang disajikan, yang membedakannya dari karya-karya sebelumnya dan memberikan nilai tambah terhadap pemahaman isu kebijakan atau proses pembuatan kebijakan.

Kebaruan atau kontribusi ini dapat berupa perspektif teoretis yang baru, penerapan metodologi yang inovatif dalam konteks kebijakan tertentu, temuan empiris yang

belum pernah terungkap sebelumnya, pengembangan alternatif kebijakan yang lebih kreatif atau efektif, atau sintesis informasi yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai masalah kebijakan. Penjelasan mengenai kebaruan atau kontribusi ini penting untuk menjustifikasi signifikansi artikel, mencegah adanya klaim kepenulisan yang tidak sah menghargai keterlibatan nyata dari setiap individu yang tercantum sebagai penulis, serta menunjukkan bagaimana artikel tersebut memajukan pengetahuan atau praktik dalam suatu kebijakan publik.

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif kebijakan merujuk pada serangkaian pilihan tindakan atau strategi yang berbeda yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah kebijakan yang telah diidentifikasi berdasarkan “pernyataan masalah/*problem statement*”, hasil dan pembahasan serta analisis kebijakan di atas.

Setiap alternatif kebijakan harus diuraikan secara jelas, termasuk mekanisme kerjanya, potensi dampaknya (baik positif maupun negatif), sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi, serta tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi. Penyajian alternatif kebijakan yang beragam memungkinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk membandingkan berbagai opsi dan mempertimbangkan *trade-off* yang mungkin ada di antara pilihan-pilihan tersebut.

Lebih lanjut, dalam menyajikan alternatif kebijakan, artikel kebijakan yang baik tidak hanya menyebutkan berbagai opsi, tetapi juga melakukan analisis komparatif terhadap masing-masing alternatif. Analisis ini melibatkan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, kelayakan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap alternatif dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Salah satu contoh analisis evaluasi yang dapat digunakan dalam alternatif kebijakan ini dengan menerapkan teori analisis yang ada, seperti: teori William N. Dunn, yang dikenal dengan “skoring alternatif kebijakan”, teori Eugene Bardach, teori Rensis Likert, teori SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*), atau teori lainnya yang terkait dengan kebijakan publik.

#### ***Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn***

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya **kriteria evaluasi** dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.

- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Dalam praktiknya, seorang analis kebijakan dapat mengembangkan sistem skoring dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan prioritas dan nilai-nilai yang relevan dengan isu kebijakan tertentu. Kemudian, setiap alternatif kebijakan akan dinilai (diskorkan) berdasarkan kinerjanya pada setiap kriteria tersebut. Hasil skoring ini kemudian dapat digunakan untuk membandingkan dan meranking alternatif kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, alih-alih satu teori skoring yang baku, Dunn lebih menekankan pada penggunaan kriteria evaluasi yang relevan dan sistematis untuk menilai dan membandingkan pilihan kebijakan.

Contoh “Isu Kebijakan: Penanganan Sampah Plastik di Perkotaan” dalam bentuk tabel skoring kriteria alternatif kebijakan William N. Dunn

No	Kriteria Kebijakan	Skoring Alternatif Kebijakan (Nilai 1 – 10)					
		Alternatif Kebijakan I	Skor	Alternatif Kebijakan II	Skor	Alternatif Kebijakan III	Skor
		Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai		Program Daur Ulang Intensif		Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah	
1	Efektivitas	Dampak signifikan pada pengurangan sampah	12	Mengurangi volume sampah	9	Potensi mengurangi timbulan sampah	9
2	Efisiensi	Biaya implementasi awal menengah	6	Membutuhkan investasi awal besar	8	Teknologi mahal dan operasional kompleks	4
3	Kecukupan	Menangani sumber utama masalah	6	Menangani sebagian masalah	4.5	Potensi solusi jangka panjang	4.5
4	Pemerataan	Dapat mempengaruhi beberapa sektor ekonomi kecil	3	Menciptakan lapangan kerja	4	Dapat menciptakan lapangan kerja	3
5	Respon-sivitas	Mendapat dukungan dari kelompok lingkungan	4	Dapat diterima sebagian besar pihak	3	Mungkin ada resistensi terhadap teknologi baru	2
6	Kelayakan Politik	Mungkin ada resistensi dari industri tertentu	4.5	Cukup didukung oleh berbagai pihak	6	Membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat	4.5
<b>Total Skoring</b>			<b>35.5</b>		<b>34.5</b>		<b>27</b>

Berdasarkan hasil skoring alternatif kebijakan pada tabel di atas, maka **Alternatif 1: Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai** memiliki opsi yang paling menjanjikan untuk dijadikan rekomendasi kebijakan. Dengan total nilai tertinggi (35.5), alternatif ini dinilai paling efektif dalam mengurangi timbulan sampah plastik dan cukup responsif terhadap isu lingkungan. Meskipun mungkin menghadapi resistensi dari beberapa sektor industri, potensi dampaknya yang signifikan dalam

mengatasi sumber utama masalah menjadikannya pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

Meskipun Alternatif 2: Program Daur Ulang Intensif juga menunjukkan hasil yang cukup baik (34.5), Alternatif 1 unggul dalam hal efektivitas dan kecukupan dalam menangani akar permasalahan sampah plastik. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dapat difokuskan pada implementasi langkah-langkah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap dan terukur, disertai dengan insentif bagi penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun, penting untuk diingat bahwa rekomendasi akhir juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual lainnya, seperti: aspek sosial, ekonomi, dan implementasi praktis di lapangan.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Bagian kesimpulan dalam artikel kebijakan merupakan rangkuman akhir yang secara ringkas dan padat menyampaikan temuan-temuan utama dari analisis kebijakan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan kebijakan atau tujuan analisis yang telah ditetapkan di bagian awal artikel. Alih-alih mengulang detail dari hasil dan pembahasan, kesimpulan menyajikan intisari dari temuan-temuan signifikan dan implikasi utamanya terhadap isu kebijakan yang diangkat. Bagian ini memberikan penutup yang jelas dan membantu pembaca untuk memahami poin-poin krusial dari keseluruhan analisis.

Lebih lanjut, kesimpulan dalam artikel kebijakan sering kali menyoroti kontribusi utama dari analisis yang telah dilakukan terhadap pemahaman isu kebijakan atau perdebatan yang sedang berlangsung. Penulis dapat menekankan signifikansi temuan dalam konteks yang lebih luas, misalnya relevansinya terhadap teori kebijakan, implikasinya bagi praktik kebijakan, atau dampaknya terhadap masyarakat. Kesimpulan yang baik tidak hanya merangkum, tetapi juga memberikan penegasan akhir mengenai pentingnya isu kebijakan yang dibahas dan nilai dari analisis yang telah disajikan.

Selain itu, bagian kesimpulan dapat pula secara implisit atau eksplisit menunjuk pada keterbatasan dari analisis yang telah dilakukan dan memberikan arahan singkat untuk agenda analisis kebijakan di masa depan. Kesimpulan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan temuan analisis dengan implikasi praktis dan kebutuhan untuk tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, kesimpulan yang efektif meninggalkan kesan yang kuat pada pembaca dan menggarisbawahi pesan utama dari artikel kebijakan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas dipilih salah satu Rekomendasi kebijakan dalam artikel kebijakan adalah bagian yang secara eksplisit merekomendasikan arah kebijakan yang spesifik, singkat, dan terukur kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan terkait dalam bentuk regulasi, didasarkan pada analisis dan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Bagian ini mengartikulasikan langkah-langkah konkret yang sebaiknya diambil untuk mengatasi masalah kebijakan, memanfaatkan peluang, atau mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan kelayakan politik, ekonomi, sosial, dan teknis. Rekomendasi yang efektif didukung oleh argumentasi yang kuat dari hasil analisis, mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin, dan sering kali menyertakan implikasi praktis serta potensi konsekuensi dari implementasi saran yang diajukan.

## REFERENSI

- Alshodiq, Mukhtar. 2020. Himpunan Peraturan Sistem Perbukuan dan Hak Cipta di Indonesia: Dilengkapi Peraturan Tentang Pemberian ISBN dan Akreditasi Penerbitan Ilmiah. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- A.W. Munawwir. 1997. "E-Book Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." 237.
- Butt, Simon and Tim Lindsey. 2018. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Gunakaya, A. Widiada. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press.
- . 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hamdi. 2023. "Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2(2):309–32. doi: <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i2.75>.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heny, Hendrayati, dan Budhi Pamungkas. 2016. "Implementasi Model Hybrid Learning pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI." *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM UPI* 3(1):182.
- Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. 2017. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.
- JambiLINK.id. 2024. "Dana BOS Rawan Penyimpangan, Pengawasan di Sekolah Lemah?" JambiLINK.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 863 K/PDT/2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Nott, Jemma. 2020. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a "Debt Trap"?" <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian. 2019. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saragih, Bonarsius. 2015. "Kebijakan Pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Penegak Hukum yang Profesional dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soeprapto. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stamper, Kory. 2017. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." *Interview by Terry Gross*, 19 April 2017.

- Sugiarto, Irwan. 2007. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in the Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37-45. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Sunaryo, Agus. 2025. Modul Perencanaan Sosial: Diklat Penjurusan Perencanaan Tingkat Madya, Muda, Pertama Kementerian Agama. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Taufik, Giri Ahmad. 2017. 'Freeport dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widyantini, Rini, *et.al.* 2017. *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, 2018.

## LAMPIRAN I

### Contoh Lampiran USG

Analisis USG	Penjelasan	Peringkat
<i>Urgency</i> (Urgensi)		... (Tinggi)
<i>Seriousness</i> (Keseriusan)		... (Sangat Tinggi)
<i>Growth</i> (Pertumbuhan)		... (Tinggi)

## LAMPIRAN 2

### Tabel Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Alternatif Kebijakan	Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn (1-5)					Total Skor
	Efektifitas	Efisi-ensi	Pemera-taan	Respon-sivitas	Kelayakan Politik	
Alternatif 1: .....						
Alternatif 2: .....						
Alternatif 3: .....						
Alternatif 4: .....						
Alternatif 5: .....						